

ISSN (Print) : 1412-7601

ISSN (Online) : 2654-8712

Volume 7, No.1 Maret 2021

<http://www.ekonobis.unram.ac.id>

**EKONOBIS**

## **ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN PRODUCT DOMESTIC REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014-2018**

**Yusuf Hasbullah, Siti Fatimah, Tuty Handayani**

Universitas Mataram

### ARTICLE INFO

*Bbzanz* *Keywords:*  
*Regional Expenditures*  
*and GRDP*

**ABSTRACT :** *In line with the increasingly broader flow of authority that each region has in this era of regional autonomy, the role and function of regional revenue through exploring the potential of each region becomes very important. The perspective of regional autonomy associated with economic growth can be seen from various aspects, including through regional spending. The purpose of this study is to see the impact of regional spending on the growth of gross regional domestic product (PDRB) in West Lombok Regency in 2014-2018. this type of research is a descriptive study. Data collection techniques use library research (Library Research) and field research (Field Research). The variables analyzed in this study include direct expenditure, including: a. Establishment of a Reserve Fund, which consists of Regional Capital Participation, Regional Debt Principal Payments, Regional Loans. b. Indirect Expenditures which include: Personnel Expenditures, Interest Expenditures, Subsidized Spending, Grant Spending, Social Assistance Expenditures, Village Government Expenditures, Financial Assistance Expenditures to Kabupaen/City and Unexpected Expenditures. While the analysis model used is: a). Analysis of regional expenditure growth on economic growth, and b) Analysis of the contribution of regional spending to economic growth in West Lombok Regency in 2014-2018.*

*Kata Kunci:*  
*Agrowisata, Partisipasi*  
*masyarakat, penelitian*  
*kualitatif*

**ABSTRAK:** *Sejalan dengan arus pemberian kewenangan yang makin luas yang dimiliki tiap daerah dalam era otonomi daerah ini, maka peran dan fungsi pendapatan daerah melalui penggalian potensi masing-masing daerah menjadi sesuatu yang amat penting. Perspektif otonomi daerah yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya melalui belanja daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dampak belanja daerah terhadap pertumbuhan product domestic regional brutto (PDRB) di kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018. jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Variabel yang dianalisis dalam penelitian meliputi Belanja Langsung meliputi: a. Pembentukan Dana Cadangan, yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Pokok Utang Daerah, Pemberian Pinjaman Daerah. b. Belanja Tidak Langsung yang meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Pemerintahan desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaen/Kota dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan model analisis yang digunakan adalah: a). Analisis pertumbuhan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, dan b) Analisis kontribusi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018.*

Corresponding Author :

Alamat : Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jln. Majapahit No. 62 Mataram.

e-mail: [yusufhasbullah56@gmail.com](mailto:yusufhasbullah56@gmail.com)

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai yang tertuang dalam Undang-undang nomor : 25 Tahun 1999. Peranan dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan nasional diupayakan agar bertambah besar. Seiring dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor: 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka terhitung sejak itulah kewenangan pemerintah daerah semakin besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Melalui otonomi daerah yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan telah menimbulkan dampak yang cukup luas terhadap kewenangan pemerintah daerah termasuk perimbangan keuangan pusat dan daerah. Secara nyata ketentuan-ketentuan di atas telah membawa daerah menjadi otonomi yang sangat luas, perimbangan keuangan yang lebih adil, profesional dan transparan antar setiap lembaga pemerintahan baik untuk tingkat kabupaten kota maupun

provinsi. Sejalan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah diberi hak otonomi untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu komponen pemicu tumbuhnya prekonomian suatu daerah.

Untuk penyusunan APBD memerlukan perhatian terutama dalam pendistribusian anggaran penerimaan pada sector-sektor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan sebagaimana yang telah digariskan dalam pola dasar pembangunan daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) periode lima tahun. Sejalan dengan itu untuk melihat keberpihakan pola penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang secara eksplisit dapat dilihat melalui alokasi dana pembangunan daerah menjadi penting untuk dicermati secara lebih mendalam. Mengapa hal ini menjadi sangat penting, karena melalui alokasi dana pembangunan yang dituangkan dalam APBD tersebut akan mencerminkan sistem politik yang dianut oleh pemerintah daerah dalam

mengeksekusi program-program yang tertuang dalam APBD-nya. Lebih lanjut analisis alokasi APBD ini akan dapat dilihat melalui alokasi dana APBD ke dalam dana rutin. Alokasi dana rutin secara konseptual digunakan untuk mendukung pelaksanaan eksekusi dana pembangunan.

Distribusi anggaran belanja pembangunan melalui berbagai sector kegiatan secara proporsional dapat merupakan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mendorong sector-sektor strategis guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang selama ini masih didominasi oleh sector pertanian semata. Secara operasional semestinya alokasi dana-dana pembangunan memungkinkan untuk dapat mendorong sector ekonomi produktif sehingga secara multiplier dapat meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan PDRB. Salah satu strategi yang dapat dilakukan disamping mendorong sector ekonomi produktif juga dapat melalui sector ekonomi dan sosial yang dapat mendatangkan sumber penerimaan baru untuk meningkatkan penerimaan daerah. Semua kegiatan di atas dapat dilakukan melalui realokasi sistem pengalokasian anggaran pembangunan, dimana paradigma penggunaan anggaran yang

selama ini lebih banyak berbasis program atau proyek yang berbasis sosial dapat dialihkan ke program atau proyek yang berbasis ekonomi (value added). Untuk itu sangat diperlukan analisis mengenai pengalokasian anggaran pembangunan, sehingga pencapaian sasaran pembangunan dapat lebih efisien dan efektif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pembangunan.

Melalui otonomi daerah yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan telah menimbulkan dampak yang cukup luas terhadap kewenangan pemerintah daerah termasuk perimbangan keuangan pusat dan daerah. Secara nyata ketentuan-ketentuan di atas telah membawa daerah menjadi otonomi yang sangat luas, perimbangan keuangan yang lebih adil, proporsional dan transparan antar setiap lembaga pemerintahan baik untuk tingkat kabupaten kota maupun provinsi.

Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan

pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. (Mardiasmo, 2002:59).

Dari sisi reformasi keuangan sebagai pelaksanaan amanat otonomi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang mengatur mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel berdasarkan asas kewajaran dan kepatutan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut semakin membawa perubahan yang mendasar dalam pengelolaan anggaran daerah (APBD). Perubahan mendasar tersebut adalah adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Sebagaimana menurut Abdul Halim (2002:5) bahwa sebelum reformasi keuangan daerah, pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada pemerintah yang lebih tinggi. Dengan adanya reformasi, pertanggungjawaban

lebih ditujukan kepada rakyat melalui DPRD.

Pergeseran atau reformasi yang mendasar terhadap pengelolaan anggaran daerah memiliki konsekuensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena APBD merupakan suatu daftar rincian penerimaan dan belanja daerah yang sekaligus berfungsi sebagai alat atau dasar pengelolaan keuangan daerah dalam setiap tahun anggaran tertentu. Dimana semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait dengan fungsi dan tugas pemerintah daerah dalam era otonomi daerah akhir-akhir ini maka, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peranan identifikasi potensi dan sumber perolehan keuangan daerah menjadi sesuatu yang amat penting. Ini diharapkan akan mampu memberikan informasi yang lebih akurat mengenai alternatif sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara implisit ketersediaan data mengenai perkembangan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dijadikan bahan acuan pemerintah daerah dalam membuat perencanaan dan

pola kebijakan pemerintah daerah terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang sekaligus dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi sampai sejauhmana tingkat kemandirian dan desentralisasi fiskal daerah di era otonomi daerah sekarang ini.

Mengingat APBD merupakan salah satu alat atau instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka dalam pelaksanaan otonomi daerah proses penyusunan dan pelaksanaan APBD harus sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan publik atau masyarakat. Dalam kaitan dengan ini, APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaruh Alokasi Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB) di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018
2. Seberapa besar kontribusi Alokasi Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB) di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018

#### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan utama yang ingin diamati dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengukur bagaimana Pengaruh Alokasi Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB) di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018
2. Mengetahui seberapa besar kontribusi Alokasi Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB) di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018

#### **Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengenai bagaimana perencanaan anggaran belanja daerah agar dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018 sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat.
2. Sebagai bahan informasi untuk pengambilan kebijakan terutama dalam penentuan dan alokasi belanja daerah yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik.

### **Hal-hal yang Akan Dianalisis**

Adapun variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini meliputi beberapa hal mengenai komponen belanja daerah antara lain :

1. Belanja Langsung meliputi :
  - a. Pembentukan Dana Cadangan
  - b. Penyertaan Modal Daerah
  - c. Pembayaran Pokok Utang Daerah
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah
2. Belanja Tidak Langsung meliputi :
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Bunga
  - c. Belanja Subsidi
  - d. Belanja Hibah
  - e. Belanja Bantuan Sosial
  - f. Belanja Pemerintahan desa
  - g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
  - h. Belanja Tidak Terduga

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah (2006: 9) yang berjudul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kota Mataram. Adapun variabel-variabel yang diamati dalam penelitian tersebut meliputi: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Total Pendapatan Daerah (TPD), Bagi Hasil Pendapatan Bukan Pajak (BHPBP), APBD dan PDRB. Dari hasil

kajiannya disimpulkan bahwa proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) sebesar 7,87 persen, proporsi PAD ditambah BHPBP terhadap TPD sebesar 20,68 persen, rasio PAD terhadap belanja aparatur sebesar 14,16 persen, rasio PAD ditambah BHPBP terhadap belanja aparatur sebesar 37,19 persen. Akan tetapi jika diamati perkembangannya dari tahun ke tahun nampak bahwa proporsi PAD ini semakin menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin besar. Ketergantungan yang semakin besar ini antara lain disebabkan oleh kondisi umum yang terjadi di semua kabupaten/kota yang diakibatkan oleh perubahan struktur anggaran seperti: gaji guru SD yang masuk dalam APBD, kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keadaan ini akan mengakibatkan bertambahnya total APBD yang sumber penerimaannya berasal dari dana sumbangan pemerintah pusat.

Selanjutnya dikatakan bahwa Derajat Desentralisasi kota Mataram yang diukur melalui indeks standar kebutuhan fiskal (SKF) sebesar 4 kali lebih besar dari rata-rata standar kebutuhan fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kapasitas Fiskal (KF) Kota Mataram sebesar 4,8 kali bila dibandingkan dengan rata-rata kapasitas fiskal Nusa Tenggara Barat. Namun apabila

terdapat selisih atau kekurangan, maka selisih tersebut diharapkan nantinya akan dapat ditutup melalui mekanisme dana transfer dari pemerintah pusat.

Dalam penelitiannya yang lain Hasbullah (2006: 6) yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat. Dimana variabel-variabel yang diamati dalam penelitian tersebut meliputi: Pendapatan Daerah, Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Biaya Pungutan PAD, Target Penerimaan PAD dan APBD. Dikatakan bahwa rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana dari luar (ekstern). Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pihak luar/ekstern (terutama pemerintah pusat/provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi

daerah akan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi pula. Berdasarkan hasil kajiannya sejak Tahun Anggaran 2002–2005 disimpulkan bahwa besarnya rasio kemandirian keuangan kabupaten Lombok Barat sebesar 8,70 persen, 6,65 persen, 8,34 persen dan 8,09 persen. Ini berarti kemandirian daerah Kabupaten Lombok Barat dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat relatif masih rendah bahkan cenderung menurun.

#### **Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Nizarwan dalam Halim (2004: 70) dalam bukunya yang berjudul Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah mengatakan Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor: 33 tahun 2004. Kesimpulannya adalah Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam mengalokasikan belanja aparatur dan belanja pelayanan publik senantiasa berpegang pada prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktivitas

Menurut Mardiasmo (2004) dalam bukunya yang berjudul Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah mengatakan Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Menurut Indra Bastian (2001: 6) dalam bukunya yang berjudul Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah mengatakan bahwa penyusunan APBD adalah suatu hal yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom yang bertujuan untuk: menentukan jumlah pajak yang akan dibebankan kepada masyarakat, suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, memberi isi dan arti dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sarana untuk pengawasan dan pemberian kuasa kepala daerah untuk penyelenggaraan keuangan daerah.

Selanjutnya menurut Hasbullah (2006: 4) Kinerja Keuangan Daerah merupakan suatu instrumen untuk mencermati kemampuan suatu daerah dalam aspek finansial untuk mengorganisir Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna pencapaian visi dan misi pembangunan daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara parsial dikatakan kinerja dapat diartikan sebagai alat ukur kemampuan suatu daerah dalam menggali unsur-unsur penerimaan baik penerimaan aparatur maupun penerimaan publik dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk selanjutnya dipergunakan sebagai belanja aparatur dan belanja publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), oleh sebab itu pembahasan mengenai analisis kemampuan keuangan daerah disini bertitik tolak dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 memberikan definisi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah sedangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003



tentang Keuangan Negara bahwa pendapatan daerah dan belanja daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Menurut Jaya dalam Munir, Djuanda, Tangkilisan (2004: 6) Keuangan Daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menjelaskan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Bastian (2001: 8) adanya hubungan yang erat antara Keuangan Negara dan Keuangan Daerah yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah. Sehingga baik dalam penyusunan APBD dan pelaporan keuangan daerah maupun pelaksanaannya, menceminkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata

dan bertanggungjawab yang mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa; (2) Harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan; (3) Harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah termasuk prinsip-prinsip pembagian sumber-sumber keuangan yang adil; (4) Mampu memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah; (5) Dapat menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel) dan pasti; dan (6) Semakin mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Devas et al dikutip dalam Munir, Djuanda, Tangkilisan (2004: 7) pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip: (1) tanggung jawab, (2) mampu memenuhi kewajiban keuangan, (3) kejujuran, (4) hasil guna dan daya guna, dan (5) pengendalian. Melalui misi utama dan tujuan utama pengelolaan keuangan daerah di atas, terlihat bahwa pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan

tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, yang meliputi DPRD dan masyarakat. Selain itu efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah juga harus dilaksanakan. Hal ini berarti dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah (Mardiasmo, 2002).

Selanjutnya Nizarwan (2004: 70) mengatakan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah hendaknya harus memperhatikan berbagai hal seperti: (1) Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktivitas; (2) Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas

pemerintahan dan pembangunan; (3) Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritas.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Mardiasmo dalam Munir, Djuanda, Tangkilisan (2004: 36) mengatakan bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang dan ukuran serta alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai unit kerja.

Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002, bahwa penyusunan APBD harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran, salah satunya adalah Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran yang Merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Sebagai instrument evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab Pemerintah Daerah

mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan yang meliputi:

1. Disiplin Anggaran, dimana APBD harus disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan, dan
2. Keadilan Anggaran, dimana Pendapatan Daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

Menurut Mardiasmo (2004) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi

kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program – program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap – tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. **Belanja Daerah**

Setiap kepala daerah dalam Sistem perencanaan belanja daerah merupakan bentuk implementasi pencapaian visi, misi dan program seorang kepala daerah sesuai yang pernah disampaikan dalam kampanye, sehingga secara faktual alokasi anggaran tidak saja dialokasikan untuk belanja rutin semata, namun lebih banyak dialokasikan untuk belanja pembangunan. Karena melalui kegiatan belanja pembangunan akan dapat dilihat sejauhmana seorang kepala daerah itu berkomitmen dalam orientasi pelayanan publik.

### **Perhitungan Anggaran**

Mengingat APBD merupakan salah satu alternatif yang dapat merangsang kesinambungan serta konsistensi

pembangunan di daerah, maka model penyusunan perhitungan APBD akan sangat erat kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan anggaran. Untuk itu sistem, prosedur, format dan struktur APBD yang selama ini digunakan, sangat tidak mampu mendukung tuntutan perubahan, dengan demikian perlu suatu perencanaan APBD yang lebih sistematis, terstruktur dan komprehensif (Mardiasmo, 2001: 5).

### **Roadmap Penelitian**

Dalam menggambarkan roadmap penelitian ini telah dilakukan beberapa penelitian terdahulu oleh peneliti yang terkait baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan penelitian yang sekarang dilakukan ini. Diawali dengan penelitian di Kota Mataram tentang Kinerja Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah. Hasil penelitian ini telah menemukan tentang Kemampuan Keuangan daerah yang relatif masih sangat terbatas dalam kaitannya dengan Kebutuhan Keuangan daerah baik untuk kegiatan belanja rutin maupun untuk kegiatan belanja pembangunan. Penelitian kedua mengenai analisis Celah Fiskal Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah di kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian ini telah menemukan tentang terdapat celah fiskal yang sangat besar yang mengindikasikan bahwa kemampuan

fiscal dengan kebutuhan fiscal terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Penelitian selanjutnya di kabupaten Lombok Timur mengenai analisis dana perimbangan kaitannya dengan Laju Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa masih tingginya bantuan pusat dalam bentuk dana perimbangan baik yang berasal dari dana alokasi umum (DAU) maupun yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) yang digelontorkan di kabupaten Lombok timur guna menjalankan roda pemerintahan maupun untuk melaksanakan kegiatan belanja rutin maupun belanja pembangunan.

Berdasarkan beberapa penelitian kami sebelumnya itu maka dalam penelitian kami kali ini kami ingin mempetakan kembali tentang seberapa besar peranan dan pengaruh belanja daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lombok Barat. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai fondasi penelitian selanjutnya yang akan memberikan alternatif solusi terhadap pola sistem kebijakan penyusunan anggaran yang berorientasi kepada pelayanan publik melalui alokasi dana pembangunan yang lebih besar dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif karena lebih menampilkan dokumen dan data- data faktual. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 1999:11). Selanjutnya menurut Kuncoro (2003:8) Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Penelitian deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dipilihnya Kabupaten Lombok Barat secara purposive sampling dengan dasar pertimbangan bahwa Kabupaten Lombok Barat merupakan kabupaten yang cukup tinggi angka pertumbuhan PDRB-nya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan kenyataan tersebut peneliti ingin melihat lebih jauh tingginya pertumbuhan PDRB tersebut semata disebabkan oleh variabel tertentu ataukah hal-hal lain diluar model. Diharapkan

dengan terpilihnya Kabupaten Lombok Barat sebagai lokasi penelitian akan memberikan berbagai kemudahan dari berbagai akses seperti data dan informasi lainnya.

### **Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Data dan informasi yang berkaitan dengan alokasi dana pembangunan dan alokasi dana rutin di Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan cara :

1. Studi kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, karangan ilmiah, jurnal ilmiah serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan belanja daerah seperti yang dituangkan dalam hal-hal yang akan dianalisis di atas.
2. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terutama pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB sehubungan dengan data-data dan informasi terkait dengan variabel-variabel penelitian dan hal-hal yang akan dianalisis di atas.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari Biro sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat sesuai data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun data primer

yang dimaksudkan terdiri dari : data APBD, Perubahan APBD, belanja daerah, alokasi dana pembangunan, alokasi dana rutin, pertumbuhan PDRB selama lima Tahun kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB Tahun Anggaran 2014-2018.

Sedangkan data sekunder yang digunakan merupakan data yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data serta data yang diperoleh melalui pihak kedua atau secara tidak langsung. Adapun data sekunder yang dimaksudkan terdiri dari : data alokasi dana pembangunan, alokasi dana rutin, perkembangan PDRB, data demografis, perkembangan APBD, lainnya yang mendukung judul penelitian.

### **Identifikasi dan Klasifikasi Variabel**

Dalam penelitian ini variabel yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Belanja Langsung meliputi :
  - a. Pembentukan Dana Cadangan
  - b. Penyertaan Modal daerah
  - c. Pembayaran Pokok Utang Daerah
  - d. Pemberian pinjaman daerah
2. Belanja Tidak Langsung meliputi :
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Bunga
  - c. Belanja Subsidi
  - d. Belanja Hibah
  - e. Belanja Bantuan Sosial
  - f. Belanja Pemerintahan desa

- g. Belanja bantuan Keuangan Kepada Kabupaen/Kota
  - h. Belanja Tidak Terduga
3. Product Domestic Regional Brutto (PDRB)

#### **Definisi Operasional Variabel**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

##### 1. Belanja Langsung meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan adalah dana yang dicadangkan dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) untuk hal-hal yang bersifat tidak terduga.
- b. Penyertaan Modal Daerah merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan sejumlah anggaran dalam APBD guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Pembayaran Pokok Utang Daerah merupakan suatu kewajiban setiap pemerintah daerah yang telah melakukan akad pinjam meminjam dengan pihak ketiga dan harus tetap dianggarkan melalui APBD setiap tahun.

- d. Pemberian pinjaman daerah merupakan surplus dana anggaran yang diperoleh dari sumber penerimaan daerah dan untuk siap dipinjamkan kepada pihak ketiga dengan perjanjian tertentu.

##### 2. Belanja Tidak Langsung meliputi:

- a. Belanja Pegawai merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menganggarkan sejumlah dana tertentu melalui APBD guna membayar gaji pegawai yang menjadi tanggungan daerah sesuai jumlah pegawai yang ada.
- b. Belanja Bunga merupakan sejumlah kewajiban pemerintah daerah akibat dari sejumlah pinjaman nilai utang tertentu sesuai perjanjian.
- c. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan/bantuan/subsidi daerah yang mengalami kekurangan/defisit anggaran belanja daerah.
- d. Belanja Hibah merupakan suatu bentuk bantuan yang dialokasikan pemerintah daerah untuk tujuan dan kepentingan-kepentingan membantu masyarakat yang memerlukan.

- e. Belanja Bantuan Sosial merupakan suatu bentuk kewajiban moral pemerintah daerah untuk mengalokasikan sejumlah dana tertentu guna ditujukan untuk kepentingan sosial.
- f. Belanja Pemerintahan Desa merupakan dana anggaran desa yang dialokasikan melalui APBN guna percepatan pembangunan di daerah pedesaan.
- g. Belanja bantuan Keuangan Kepada Kabupaen/Kota merupakan bantuan dana yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang diberikan kepada daerah yang mengalami defisit anggaran guna pelaksanaan pembangunan.
- h. Belanja Tidak Terduga merupakan sejumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang bersifat tidak terduga terutama yang disebabkan oleh gangguan alam.
- i. Perkembangan PDRB adalah jumlah PDRB yang diterima setiap tahun oleh pemerintah kabupaten Lombok Barat terhitung sejak Tahun 2014-2018.

### **Model Analisis Data**

### **Analisis Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Terhadap PDRB**

Guna mendapatkan gambaran tentang pengaruh belanja daerah terhadap laju pertumbuhan PDRB dan kontribusinya selama lima tahun terakhir (2014-2018) akan dianalisis dengan formulasi Widodo dalam Muin (2003: 36) yang disesuaikan sebagai berikut:

$$\Delta X_t = \frac{X_t - X_{1t} - 1}{X_{1t} - 1} \times 100\%$$

dimana:

$\Delta X_t$  : Pertumbuhan Belanja Daerah

$X_t$  : Laju Pertumbuhan Belanja Daerah

$X_{1t}$  : Laju Pertumbuhan PDRB.

### **Analisis Kontribusi Belanja Daerah Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB**

Untuk menghitung besarnya kontribusi anggran belanja daerah setiap tahunnya terhadap laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018 dengan rumus :

$$P = \frac{\sum AS}{\sum AP} \times 100\%$$

dimana :

P = kontribusi belanja daerah

AS = jumlah belanja daerah tahun- t

AP = jumlah PDRB tahun- t



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Kondisi Keuangan Daerah**

Didalam struktur APBD terdapat dua sisi, yakni sisi penerimaan (penerimaan daerah) dan sisi pengeluaran (belanja daerah). Secara umum dapat dikatakan bahwa penerimaan daerah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap berbagai kegiatan ekonomi mikro di tiap-tiap daerah. Peningkatan terhadap jumlah penerimaan daerah secara tidak langsung dapat menimbulkan peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa yang pada gilirannya dapat menimbulkan multiplier effect terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi.

Sadar akan pengaruh yang ditimbulkan, pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah terus berupaya untuk mencapai terobosan dalam meningkatkan penerimaan, salah satunya melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan jumlah PAD dari tahun ke tahun dapat terlihat secara nyata baik secara absolut maupun secara persentase terhadap target pencapaian. Adanya upaya terhadap peningkatan PAD dari sisi lain merupakan cambuk bagi pemerintah daerah untuk mencapai keberhasilan desentralisasi kewenangan.

Secara de facto pemerintah kabupaten Lombok Tengah sejak ditetapkannya sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika resort ini telah membawa angin segar terhadap potensi dan sumber penerimaan daerah kedepannya. Seperti yang kita ketahui bahwa melalui pembangunan kawasan ekonomi khusus mandalika resort telah dibangun beberapa hotel bintang lima bertaraf internasional, yang awal pembangunannya sudah dimulai sejak tahun 2017 yang lalu.

Disamping itu juga beberapa beberapa fasilitas olah raga bertaraf internasional seperti sirkuit formula one dengan beberapa fasilitas tambahan lainnya. Semua ini akan sangat berdampak terhadap masuknya investasi lain seperti : sarana pendukung olah raga baik di darat, maupun di laut (sky air, dsb.nya) maupun olah raga udara (para layang). Dampak multiplier dari pembangunan kawasan ekonomi khusus ini yang sangat massif adalah penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya sector ekonomi kreatif lainnya. Selanjutnya secara lebih komprehensif untuk melihat laju pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah sejak tahun 2012-2016 akan disajikan pada tabel 1

**Tabel 1 Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2016 (Rupiah)**

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Pertumbuhannya (%)
2012	110.789.153.137,00	77.013.503.318,00	69,51
2013	114.429.121.133,82	123.145.732.572,78	170,62
2014	131.173.268.474,00	140.497.134.570,16	107,11
2015	154.863.589.503,00	156.931.857.545,88	101,34
2016	157.674.326.963,00	166.443.247.023,43	105,56
<b>Jumlah</b>	<b>668.929.459.210,00</b>	<b>664.031.475.028,00</b>	<b>554,14</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>133.785.891.842,00</b>	<b>132.806.295.005,00</b>	<b>110,82</b>

Sumber: Kabupaten Lombok Tengah dalam Angka 2012-2016, diolah.

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan pendapatan daerah dilihat dari sisi target dengan realisasi anggaran tahun 2012 sebesar 69,51 persen, tahun 2013 sebesar 170,62 persen, tahun 2014 sebesar 107,11 persen, tahun 2015 sebesar 101,34 persen dan tahun 2016 sebesar 105,56 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 170,62 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima)

tahun terhitung sejak tahun 2012-2016 mencapai 110,82 persen.

#### **Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penjelasan berikutnya akan disajikan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir akan disajikan pada table di bawah ini

**Tabel 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2016 (Rupiah)**

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Pertumbuhannya (%)
2012	15.804.497.743	17.407.773.080	110,14
2013	16.644.425.065	23.469.135.275	133,01
2014	28.473.707.255	37.283.585.365	130,94
2015	39.142.069.882	40.321.884.932	103,01
2016	48.714.482.865	51.228.643.227	105,16
<b>Jumlah</b>	<b>1.487.791.828,10</b>	<b>1.697.110.218,79</b>	<b>582,26</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>297.558.365,62</b>	<b>339.422.043,75</b>	<b>116,45</b>

Sumber: Kabupaten Lombok Tengah dalam Angka 2012-2016, diolah.

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) dilihat dari segi dengan realisasi anggaran terhitung sejak tahun 2012 pertumbuhannya cukup signifikan yaitu sebesar 110,14 persen, tahun 2013 turun naik menjadi sebesar 133,01 persen, tahun 2014 menurun menjadi sebesar 130,94 persen, tahun 2015 turun lagi menjadi sebesar 103,01 persen dan tahun 2016 naik lagi menjadi sebesar 105,16 persen. Angka

pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 133,01 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012-2016 mencapai 116,45 persen.

#### **Perkembangan Dana Retrebusi Daerah**

Selanjutnya untuk melihat bagaimana realisasi dan pertumbuhan Dana Retrebusi selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2012-2016 akan disajikan pada tabel di bawah ini

**Tabel 3 Dana Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2016 (Jutaan Rupiah)**

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Pertumbuhannya (%)
2012	27.420.126.285	19.454.046.307	70,00
2013	26.677.585.320	19.562.362.475	73,33
2014	39.474.382.856	27.805.602.322	70,44
2015	30.972.090.918	18.694.048.163	60,36
2016	24.499.322.744	14.459.604.276	59,02
<b>J u m l a h</b>	<b>1.490.435.081,23</b>	<b>999.756.635,43</b>	<b>263,85</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>298.087.016,24</b>	<b>199.951.327,08</b>	<b>52,77</b>

Sumber : Kabupaten Lombok Tengah dalam Angka 2012-2016 (diolah).

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan Dana Retrebusi daerah dapat dilihat dari segi target dengan realisasi anggaran terhitung sejak tahun 2012 pertumbuhannya sebesar 70,00 persen, tahun 2013 menjadi sebesar 73,33 persen, tahun 2014 menjadi sebesar 70,44 persen, tahun 2015 menurun menjadi sebesar 60,36 persen dan tahun 2016

turun menjadi sebesar 59,02 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 73,33 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012-2016 mencapai 52,77 persen.

#### **Perkembangan Penerimaan Hasil Perusda dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Selanjutnya untuk melihat bagaimana realisasi dan pertumbuhan Penerimaan Hasil Perusda dan Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2012-2016 akan disajikan pada tabel 4 di bawah ini

**Tabel 4 Perkembangan Penerimaan Hasil Perusda dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2016 (Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhannya (%)
2012	3.688.840.000	4.065.980.656	116,17
2013	5.743.707.383	5.610.383.433	97,68
2014	6.155.723.764	7.202.392.078	117,00
2015	8.810.808.703	8.822.526.523	100,13
2016	3.357.884.508	10.962.220.871	326,46
<b>Jumlah</b>	<b>27.756.964.358</b>	<b>36.663.503.561</b>	<b>757,44</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>5.551.392.871,6</b>	<b>7.332.700.712</b>	<b>151,48</b>

Sumber: Kabupaten Lombok Tengah dalam Angka 2012-2016, diolah.

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan Penerimaan Hasil Perusda dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dilihat dari segi target penerimaan dengan realisasi anggaran terhitung sejak tahun 2012 pertumbuhannya sebesar 116,17 persen, tahun 2013 menjadi sebesar 97,68 persen, tahun 2014 naik menjadi sebesar 117,00 persen, tahun 2015 turun menjadi sebesar 100,13 persen dan tahun 2016

meningkat menjadi sebesar 326,46 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 326,46 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012-2016 mencapai 151,48 persen.

#### **Perkembangan Belanja Bagi Hasil**

Selanjutnya untuk melihat bagaimana realisasi dan pertumbuhan Belanja Bagi Hasil selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2012-2016 akan disajikan pada tabel 5 di bawah ini:

**Tabel 5 Belanja Bagi Hasil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2016 (jutaan rupiah)**

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Pertumbuhannya (%)
2012	149.475,00	158.018,61	6,04
2013	195.012,78	210.700,00	33,33
2014	139.538,90	227.093,61	-75,83
2015	204.500,22	226.997,92	-0,40
2016	405.279,01	421.798,35	85,81
<b>Jumlah</b>	<b>8.080.805,91</b>	<b>698.982,52</b>	<b>48,95</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>161.761,18</b>	<b>139.796,50</b>	<b>9,79</b>

Sumber: Kabupaten Lombok Tengah dalam Angka 2012-2016, diolah.

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan Belanja Bagi Hasil dilihat dari segi target anggaran dengan realisasi anggaran terhitung sejak tahun 2012 pertumbuhannya sebesar 6,04 persen, tahun 2013 naik menjadi sebesar 33,33 persen, tahun 2014 turun menjadi sebesar -75,83 persen, tahun 2015 turun lagi menjadi sebesar -0,40 persen dan tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 85,81

persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 85,81 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012-2016 mencapai 9,79 persen.

#### **Perkembangan Belanja Pelayanan Publik**

Selanjutnya untuk melihat bagaimana realisasi dan pertumbuhan Belanja Pelayanan Publik selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2012-2016 akan disajikan pada tabel 6 di bawah ini :

**Tabel 6 Belanja Pelayanan Publik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2016 (jutaan rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhannya (%)
2012	185.779	274.134	48,11
2013	291.413	323.322	74,59
2014	381.564	446.683	38,08
2015	446.683	469.315	5,16
2016	725.428	747.566	59,27
<b>Jumlah</b>	<b>2.119.867</b>	<b>2.172.020</b>	<b>225,21</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>423.973</b>	<b>434.404</b>	<b>45,04</b>

Sumber: Kabupaten Lombok Tengah dalam Angka 2012-2016, diolah.

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan Belanja Pelayanan Publik dilihat dari segi

target dengan realisasi anggaran terhitung sejak tahun 2012 pertumbuhannya sebesar 48,11 persen, tahun 2013

meningkat menjadi sebesar 74,59 persen, tahun 2014 menjadi sebesar 38,08 persen, tahun 2015 turun menjadi sebesar 5,16 persen dan tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 59,27 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 74,59 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung

sejak tahun 2012-2016 mencapai 45,04 persen.

#### **Perkembangan Pendapatan Lain Yang Sah**

Selanjutnya untuk melihat bagaimana angka pertumbuhan Pendapatan Lain Yang Sah selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2012-2016 dilihat dari segi target anggaran dengan realisasinya akan disajikan pada tabel 7 di bawah ini :

**Tabel 7 Pendapatan Lain Yang Sah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2016 (jutaan rupiah)**

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Pertumbuhannya (%)
1	2012	63.875.689.108	36.085.703.274	56,00
2	2013	64.363.406.363	74.476.851.389	115,71
3	2014	57.069.464.600	68.205.554.804	119,00
4	2015	75.938.620.000	89.128.201.927	117,37
5	2016	81.102.636.846	89.792.778.648	110,71
<b>Jumlah</b>		<b>342.349.816.917</b>	<b>357.689.090.042</b>	<b>518,79</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>68.469.963.383</b>	<b>71.5387.818.008</b>	<b>103,75</b>

Sumber : Kabupaten Lombok Tengah dalam Angka 2012-2016, diolah.

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan Pendapatan Lain Yang Sah dilihat dari segi target anggaran dengan realisasi anggaran terhitung sejak tahun 2012 pertumbuhannya sebesar 56,00 persen, tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 115,71 persen, tahun 2014 naik menjadi sebesar 119,00 persen, tahun 2015 turun menjadi sebesar 117,37 persen dan tahun 2016 meningkat lagi menjadi sebesar 110,71 persen. Angka pertumbuhan

tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 119,00 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012-2016 mencapai 103,75 persen.

#### **Perkembangan Produk Domestik Regional Brutto**

Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB) merupakan seluruh nilai tambah yang diciptakan dari berbagai aktivitas ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu (satu tahun). Adapun dasar

perhitungan PDB/PDRB sejak tahun 2014 menggunakan tahun dasar 2010 dengan basis SNA 2008. Salah satu implikasi penggunaan SNA 2008 adalah perubahan nominal dan perubahan klasifikasi PDRB dari 9 sektor menjadi 17 katagori. PDRB atas dasar harga berlaku (ADH) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016 mencapai 16,04 Trilyun rupiah. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 1,5 Trilyun dari keadaan tahun 2015 yang mencapai 14,49 Trilyun.

Jika kita ingin melihat struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi masing- masing katagori terhadap pembentukan PDRB. Angka PDRB Lombok Tengah menunjukkan bahwa katagori pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB. Sebagai gambaran pada tahun 2016 lebih dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) atau 28,35 persen PDRB Lombok Tengah berasal dari katagori pertanian.

Meskipun dari tahun ke tahun persentase ini semakin mengecil dengan pergerakan yang relatif 'kecil/halus'. Secara umum menunjukkan perlahan namun pasti kecendrungan usaha sector pertanian semakin menurun/berkurang. Selain itu PDRB atas dasar harga konstan biasanya digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dilihat dari segi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2016 mencapai 5,18 persen.

Selanjutnya untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi kabupaten Lombok tengah yang dicerminkan melalui Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) berdasarkan harga konstan tahun 2010 (ADHK) dan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2012-2016 akan disajikan pada tabel 8 di bawah ini

**Tabel 8 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2016 (jutaan rupiah)**

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	Pertumbuhan Atas Dasar Harga Berlaku (%)	Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (%)
1	2012	10.173.536	10.706.985	10,04	9,55
2	2013	10.721.723	11.531.845	10,53	9,79
3	2014	11.249.937	12.875.891	11,06	9,66
4	2015	11.913.551	14.240.549	11,21	9,37
5	2016	12.535.284	16.044.443	13,95	10,91
<b>J u m l a h</b>		<b>56.594.031</b>	<b>65.399.713</b>	<b>56,79</b>	<b>49,28</b>

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dilihat dari segi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 terhitung sejak tahun 2012 pertumbuhannya sebesar 10,04 persen dan 9,55 persen, tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 10,53 persen dan 9,79 persen, tahun 2014 turun menjadi sebesar 11,06 persen dan 9,66 persen, tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 11,21 persen dan 9,37 persen dan tahun 2016 menjadi sebesar 13,95 persen dan 10,91 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun

2016 yaitu sebesar 13,95 persen dan 10,91 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012-2016 mencapai

11,36 persen atas harga berlaku dan 9,85 persen atas harga konstan 2010.

#### **Perkembangan Kontribusi Dana Retrebusi Terhadap PDRB (ADHK)**

Selanjutnya untuk melihat bagaimana realisasi dan pertumbuhan Dana Retrebusi Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK) Lombok Tengah selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2012-2016 akan disajikan pada tabel 9 di bawah ini :

**Tabel 9 Kontribusi Dana Retrebusi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2016 (jutaan rupiah)**

Tahun	Dana Retrebusi	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	Persentase Kontribusi (%)
2012	1.021.767	10.706.985	9,55
2013	1.129.526	11.531.845	9,79
2014	1.243.781	12.875.891	9,66
2015	1.335.017	14.240.549	9,37
2016	1.749.586	16.044.443	10,91
<b>Jumlah</b>	<b>6.479.677</b>	<b>65.399.713</b>	<b>49,28</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>1.295.935</b>	<b>13.079.942</b>	<b>9,85</b>

Sumber: Kabupaten Lombok Tengah dalam Angka 2012-2016, diolah.

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan Kontribusi Dana Retrebusi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2016 sebagai berikut : terhitung sejak tahun 2012 pertumbuhan kontribusinya sebesar 9,55 persen, tahun 2013 meningkat menjadi

sebesar 9,79 persen, tahun 2014 turun menjadi sebesar 9,66 persen, tahun 2015 turun lagi menjadi sebesar 9,37 persen dan tahun 2016 meningkat lagi menjadi sebesar 10,91 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 10,91 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima)



tahun terhitung sejak tahun 2012-2016 mencapai 9,85 persen.

### **Perkembangan Kontribusi Dana Retrebusi Terhadap PDRB (ADHB)**

Selanjutnya untuk melihat bagaimana pertumbuhan Kontribusi Dana Retrebusi

Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Lombok Tengah selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2012-2016 akan disajikan pada tabel 10 di bawah ini:

**Tabel 10 Kontribusi Dana Retrebusi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2016 (jutaan rupiah).**

Tahun	Dana Retrebusi	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Persentase Kontribusi (%)
2012	1.021.767	10.173.536	10,04
2013	1.129.526	10.721.723	10,53
2014	1.243.781	11.249.937	11,06
2015	1.335.017	11.913.551	11,21
2016	1.749.586	12.535.284	13,95
<b>Jumlah</b>	<b>6.479.677</b>	<b>56.594.031</b>	<b>56,79</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>1.295.935</b>	<b>11.318.806</b>	<b>11,36</b>

*Sumber: Kabupaten Lombok Tengah dalam Angka 2012-2016, diolah.*

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan Kontribusi Dana Retrebusi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2016 sebagai berikut: terhitung sejak tahun 2012 pertumbuhan kontribusinya sebesar 10,04 persen, tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 10,53 persen, tahun 2014 meningkat menjadi

sebesar 11,06 persen, tahun 2015 meningkat lagi menjadi sebesar 11,21 persen dan tahun 2016 meningkat lagi menjadi sebesar 13,95 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 13,95 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012-2016 mencapai 11,36 persen.

**Tabel 11 Kontribusi Belanja Pembangunan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2016 (jutaan rupiah)**

Tahun	Belanja Pembangunan	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 10	Persentase Kontribusi (%)
2012	166.443.503.457	10.241.302	13,14
2013	189.324.062.602	10.768.803	13,72
2014	128.546.912.658	11.252.161	14,14
2015	122.274.231.231	11.771.045	16,00
2016	124.768.935.236	12.535.284	17,79
<b>Jumlah</b>	<b>7.313.576.451.844</b>	<b>56.568.595</b>	<b>58,95</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>1.462.715.290.378</b>	<b>11.313.719</b>	<b>11,79</b>

*Sumber: Kabupaten Lombok Tengah dalam Angka 2012-2016, diolah.*

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan Kontribusi Dana Pembangunan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2016 sebagai berikut: terhitung sejak tahun 2012 pertumbuhan kontribusinya sebesar 13,14 persen, tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 13,72 persen, tahun 2014 meningkat menjadi

sebesar 14,14 persen, tahun 2015 meningkat lagi menjadi sebesar 16,00 persen dan tahun 2016 meningkat lagi menjadi sebesar 17,79 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 17,79 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012-2016 mencapai 11,79 persen.

**Tabel 12 Kontribusi Belanja Rutin Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 2016 (jutaan rupiah)**

Tahun	Belanja Rutin	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Persentase Kontribusi
2012	1.114.563.725	10.243.532	13,72
2013	1.385.758.151	11.665.563	6,24
2014	1.488.365.008	13.202.878	6,28
2015	1.668.839.731	14.675.882	5,58
2016	1.824.001.732	15.535,845	5,67
<b>Jumlah</b>	<b>7.481.528.347</b>	<b>65.323.700</b>	<b>37,49</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>1.496.305.669</b>	<b>13.064.740</b>	<b>7,50</b>

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan Kontribusi Dana Rutin Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2016 sebagai berikut: terhitung sejak tahun 2012 pertumbuhan kontribusinya sebesar 13,72 persen, tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 6,24 persen, tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 6,28 persen, tahun 2015 meningkat lagi menjadi sebesar 5,58 persen dan tahun 2016 meningkat lagi menjadi sebesar 5,67 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 13,72 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012-2016 mencapai 7,50 persen.

Jika dilihat kondisi pendapatan daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2015 sebesar 1,91 Trilyun rupiah terjadi peningkatan sekitar 218,6 milyar rupiah atau sebesar 12,9 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2014. Jika dilihat dari segi komposisinya sebahagian besar pendapatan ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2015 jumlah DAU yang diterima mencapai 1,08 Trilyun atau sekitar 56,5 persen dari total pendapatan daerah. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlalu besar dilihat dari segi persentasinya terhadap total pendapatan. Sebagai ilustrasi pada tahun 2015 PAD Kabupaten Lombok Tengah sejumlah 189,27 milyar atau sekitar 9,9 persen dari total pendapatan daerah. Meskipun demikian jumlah PAD Kabupaten Lombok Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan angka peningkatan. Jika dilihat dari segi penggunaan atau belanja daerah, total belanja daerah mencapai 1,66 trilyun pada tahun 2015. Lebih besar dibandingkan dengan belanja tahun 2014 yang mencapai 1,62 trilyun. Dari komponen belanja daerah tersebut, belanja pegawai ternyata merupakan komponen yang paling besar. Sebagai ilustrasi jumlah belanja pegawai pada tahun 2015 mencapai 1,02 trilyun atau sekitar 61,35 persen dari total belanja daerah.

Jika diamati secara lebih spesifik realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016 sebesar 2,22 Trilyun Rupiah meningkat sekitar 200 milyar rupiah atau 12,9 persen dibandingkan dengan realisasi di tahun 2015. Dilihat dari komposisinya sebagian besar pendapatan ini masih bersumber dan berasal dari Dana alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2016 DAU yang diterima sebesar 1,16 Trilyun atau sekitar 52,29 persen dari total

pendapatan daerah. Sedangkan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlalu besar dilihat dari persentasinya terhadap total pendapatan. Tahun 2016 PAD Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 236 milyar atau sekitar 10,62 persen saja. Meskipun demikian jumlah PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dilihat dari segi penggunaan atau belanja daerah, total belanja daerah mencapai 2,23 triliun pada tahun 2016. Lebih besar dibandingkan dengan belanja tahun 2015 yang mencapai 1,66 triliun. Dari komponen belanja daerah tersebut, belanja pegawai ternyata merupakan komponen yang paling besar. Sebagai ilustrasi jumlah belanja pegawai pada tahun 2016 mencapai 1,09 triliun atau sekitar 48,89 persen dari total belanja daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Laju pertumbuhan Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2016 sebagai berikut : Tahun 2012 kontribusinya sebesar 9,55 persen, tahun 2013 meningkat tipis menjadi sebesar 9,79 persen, tahun 2014 turun menjadi sebesar 9,66 persen, tahun 2015 turun lagi menjadi sebesar 9,37 persen dan tahun 2016 meningkat lagi menjadi sebesar 10,91 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 10,91 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012-2016 mencapai 9,85 persen.
2. Laju pertumbuhan Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2016 sebagai berikut: Tahun 2012 pertumbuhan kontribusinya sebesar 10,04 persen, tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 10,53 persen, tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 11,06 persen, tahun 2015 meningkat lagi menjadi sebesar 11,21 persen dan tahun 2016 meningkat lagi menjadi sebesar 13,95 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 13,95 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012-2016 mencapai 11,36 persen.
3. Kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur sangat signifikan sehingga dampaknya terhadap laju

pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dalam pertumbuhan PDRB (ADHB) Kabupaten Lombok Timur selama 5 (lima) Tahun (2012-2016) relatif cukup signifikan pula dengan kisaran antara 9,37-10,91 persen dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun sebesar 9,85 persen. Sedangkan PDRB (ADHK2010) pertumbuhannya cukup signifikan pula dengan kisaran antara 10,04-13,95 persen atau rata-rata pertumbuhan selama lima tahun sebesar 11,36 persen.

#### Saran

1. Mengingat besarnya peranan dana perimbangan baik yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) maupun yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) terhadap pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi (PDRB), maka pemerintah kabupaten Lombok Timur kedepannya tidak dapat secara terus menerus menggantungkan sumber pendapatan daerahnya dari dana perimbangan tersebut. Oleh karenanya mulai saat ini hendaknya pemerintah daerah harus sudah mulai berpikir tentang penggalan potensi

sumber-sumber pendanaan dan pendapatan daerah lainnya agar tidak terlalu mengandalkan dana perimbangan sebagai sumber dana satu-satunya untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor ekonomi.

2. Disamping optimalisasi penggalan potensi sumber dana, pemerintah kabupaten Lombok Timur hendaknya dapat melakukan intensifikasi perpajakan melalui penerapan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan serta pemberian reward and fanishment terhadap petugas pajak yang ada. Dari segi ekstensifikasi penerimaan yaitu dengan melakukan pendataan ulang seluruh potensi pajak sebagai sumber penerimaan yang ada di kabupaten Lombok Timur sehingga kedepan perlahan namun pasti sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor pajak dan pendapatan lain yang syah dapat dimaksimalkan sehingga ketergantungan terhadap dana perimbangan secara perlahan mulai dapat dikurangi sedikit demi sedikit.

---

#### DAFTAR PUSTAKA

---

....., 1996. "Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan". Kependagri No.

690.900.327, 1996.

.....,1998. "Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah". Kepmendagri Nomor 110.

.....,1999. " Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah". Kepmendagri Nomor 3.

....., 1999. "Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1999/2000". Inmendagri Nomor 4.

....., 2000. "Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001". Surat Edaran Mendagri No. 903/2735/SJ.

.....,2000. "Peraturan Pemerintah Nomor 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah". Ditjen PUOD Depdagri, Jakarta.

....., 2001. "Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002". Surat Edaran Mendagri No. 903/2477/SJ.

....., 2003. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tentang Keuangan Negara". Departemen Keuangan, Jakarta.

....., 2004. "Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah". Penerbit CV. Tamita Utama, Jakarta.

....., 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah". Penerbit CV. Tamita Utama, Jakarta.

....., 2005. "Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah". Ditjen BAKD Depdagri, Jakarta.

....., 2006. Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri, Jakarta.

....., 2007. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri, Jakarta.

Bastian, Indra., 2001. "Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 2001". Penerbit BPF, Yogyakarta.

Halim, Abdul., 2002. "Akuntansi Keuangan Daerah". Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

- ....., 2004. "Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah". Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Hasbullah Yusuf, 2007, Analisis Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2002-2005). Penerbit : Mataram Press Majalah Ilmiah ORIZA Universitas Mataram Vol.VI/No.2 April 2007.
- ....., 2007, Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kota Mataram. Penerbit : Mataram Press Majalah Ilmiah ORIZA Universitas Mataram Vol.VI/No.3 Juli 2007.
- Kuncoro, Mudrajad., 2003. "Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi (Bagaimana meneliti & menulis tesis)". Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Luo, Huaping and Robert T Golembiewski., 1996. "Budget Deficits in China Calculations, Causes, and Impacts". The Pennsylvania State University, JXR11 @ PSU.EDU.
- Mamesah D.J., 1995. "Sistem Administrasi Keuangan Daerah". Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo, MBA, Ak., 2000. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah, Makalah Seminar HIMMEP, Yogyakarta.
- ....., 2001. "Perencanaan Keuangan Publik Sebagai Suatu Tuntutan Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Bersih dan Berwibawa". Makalah, Jakarta.
- ....., 2002. "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah". Serial Otonomi Daerah, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- ....., 2004. "Akuntansi Sektor Publik". Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Munir Dasril, Djuanda, Tangkilisan., 2004. "Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah". Penerbit YPAPI, Yogyakarta.
- Nazir Moh, Ph.D, 1983. Metode Penelitian, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suparmoko.M, MA, Ph.D, 2003. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, Edisi 5, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Sugiyono., 1999. "Metode Penelitian Bisnis". Penerbit CV. ALFABETA, Bandung.